

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah berlandaskan pada aturan dan ketentuan sering kali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada lembaga pemerintahan biasanya muncul berbagai isu karena adanya pihak yang kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan tentunya harus dihadapi oleh setiap lembaga pemerintahan. Salah satu isu yang melanda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga menjadi perbincangan publik ialah mengenai pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy. Mobil dinas yang baru dibeli itu adalah *Mitsubishi Pajero* dan *Hyundai Palisade* dengan total anggaran mencapai Rp2 miliar, sehingga menjadi polemik karena waktu pembeliannya yang tidak tepat.

Pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat akhirnya menjadi perbincangan di kalangan publik pada bulan Agustus 2021 lalu. Banyak media *online* yang memberitakan mengenai pembelian mobil dinas ini, salah satunya dari Liputan6.com yang berjudul “Gubernur dan Wagub Sumbar Kompak Beli Mobil Dinas Baru Rp2 Miliar di Tengah Badai Pandemi”¹. Hal ini menuai kritikan dari berbagai kalangan disebabkan mobil dinas ini dibeli pada masa pandemi virus Covid-19. Seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap penanganan Covid-19, sehingga kepala daerah dinilai tidak memiliki rasa peka pada kondisi

¹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4633695/Gubernur-dan-wagub-sumbar-kompak-beli-mobil-dinas-baru-rp2-miliar-di-tengah-badai-pandemi>. Diakses pada tanggal 4 April 2022.

yang tengah terjadi di masyarakat. Sejumlah anggota dewan memberikan kritik kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap kebijakan tersebut. Opini mengenai pembelian mobil dinas ini muncul pertama kali oleh Politisi Partai Demokrat, yaitu Nofrizon. Dikutip dari Kompas.com, Nofrizon mengatakan secara aturan tidak ada yang salah dalam pembelian mobil dinas tersebut, tetapi yang menjadi sorotan ialah Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai minim etika saat masyarakat tengah mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Anggota DPR RI, Andre Rosiade juga menilai Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy tidak memiliki *sense of crisis* sebagai kepala daerah².

Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan hasil wawancara Gubernur Sumatera Barat menjelaskan, pembelian mobil dinas dilakukan karena kondisi mobil dinas yang lama sudah rusak³. Dalam wawancara tersebut, Gubernur juga menyampaikan penganggaran untuk mobil dinas ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2021. Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rosail juga menjelaskan, pergantian kendaraan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian dari meningkatkan upaya penanganan Covid-19. Menurutnya, Gubernur sebagai Ketua Satgas Covid-19 mobilisasinya luar biasa. Kebijakan pembelian mobil dinas ini sudah menjadi pembahasan secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan media massa oleh Biro Administrasi Pimpinan, menunjukkan bahwa ekspos Gubernur didominasi oleh isu mobil dinas dengan presentase 22% di media *online* dan 19% pada media cetak, kemudian untuk Wakil Gubernur 18% di media *online* dan 24% di media cetak.

² <https://regional.kompas.com/read/2021/08/16/191346278/soal-Gubernur-sumbar-dan-wakilnya-beli-mobil-dinas-baru-anggota-dpr-ri?page=all> . Diakses pada tanggal 4 April 2022.

³ *Ibid.*

Oleh karena itu, pada tanggal 19 Agustus 2021, Gubernur Mahyeldi memutuskan untuk menyerahkan mobil dinas tersebut kepada Satgas penanganan Covid-19.

Dikutip dari CNN Indonesia, Gubernur Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf dalam pertemuan bersama wartawan di Istana Gubernur, "Mencermati isu mobil dinas kepala daerah Sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi⁴. Namun, pada bulan Maret 2022 lalu, kembali muncul pemberitaan bahwa mobil yang telah diserahkan kepada Satgas penanganan Covid-19 dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digunakan kembali (kompas.com)⁵.

Pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur di masa pandemi ini dikatakan sebagai sebuah isu karena terjadinya argumentasi publik di media massa. Kondisi seperti ini tentunya merupakan hal yang tidak diinginkan. Isu semakin marak diperbincangkan karena peran media yang ikut serta mempublikasikan lewat media yang mereka miliki. Untuk menanggapi isu yang beredar tersebut, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasinya. Isu yang muncul ke permukaan dan kemudian sudah beredar di tengah masyarakat harus segera mendapatkan penanganan dan respon yang cepat dari instansi. Jika sebuah isu dibiarkan berkembang dan menyebar di tengah masyarakat akan berpotensi berubah menjadi sebuah krisis dan memberikan efek yang lebih signifikan terhadap kinerja organisasi di masa yang akan datang. Dalam lembaga/organisasi pihak yang

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819155822-20-682545/Gubernur-sumbar-serahkan-mobil-dinas-rp29-m-ke-Satgas-covid>. Diakses pada tanggal 4 April 2022.

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2022/03/31/170700578/balada-mobil-dinas-baru-Gubernur-dan-wagub-sumbar-sempat-diserahkan-untuk?page=2>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

bertanggung jawab dalam hal ini ialah Hubungan Masyarakat (Humas). Peran Humas juga banyak dilibatkan di berbagai kegiatan seperti menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pihak internal maupun eksternal, salah satunya adalah dalam mengelola isu.

Untuk keefektifan suatu organisasi, mengelola isu menjadi penting karena semua organisasi saling berhubungan dan bergantung dengan publik. Humas merupakan suatu fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan komunikasi untuk menumbuhkan pemahaman dan penerimaan dari publik (Suprawoto, 2018:42). Menurut Mike McCurry dalam sistem pemerintah tentunya memiliki informasi yang sangat banyak sehingga pemerintah memerlukan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan disinilah peran seorang juru bicara pemerintah (Suprawoto, 2018:86).

Isu mobil dinas yang pembeliannya dinilai dilakukan pada waktu yang tidak tepat ini, merupakan jenis isu selektif yaitu isu yang berkembang pada kelompok tertentu. Isu pembelian mobil dinas merupakan isu yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya Nofrizon dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Andre Rosiade.

Pada sistem organisasi Sekretariat Daerah Sumatera Barat, bidang yang berperan dalam hal komunikasi dan informasi biasanya adalah Biro Humas. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 56 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2019 adanya perubahan nomenklatur yang disebabkan adanya pergeseran urusan dari satu OPD ke OPD

lainnya yang disesuaikan namanya berdasarkan regulasi terbaru. Berdasarkan hal ini, perubahan terjadi pada Biro Humas, yang pada perda terbaru berubah nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Selanjutnya ada urusan yang dibawah oleh Biro Humas dipindahkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumatera Barat⁶. Melakukan manajemen terhadap isu kebijakan pemerintah merupakan tanggung jawab bagian kehumasan.

Manajemen isu merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu yang tengah muncul ke permukaan, kemudian memberikan reaksi kepada isu tersebut sebelum menyebar luas kepada masyarakat (Regester & Larkin, 2002:202). Dasar pemikiran Humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar (Moore, 2004:489). Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, oleh karena itu para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat.

Humas merupakan fungsi manajemen yang khas guna mendukung dan memelihara jalur bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan khalayaknya. Hal tersebut melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini, menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya, dan juga sebagai sistem peringatan guna membantu

⁶ <https://languam.id/15-OPD-di-pemprov-sumbar-ganti-nomenklatur-pejabatnya-dikukuhkan-kembali/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

mengantisipasi kecenderungan dengan menggunakan penelitian serta komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama (Liliweri, 2011:654).

Isu tidak dapat dipastikan akan menghilang, dan kemungkinan bisa muncul kembali dengan masalah yang relevan (Kriyantono, 2014:161). Dengan digunakannya kembali mobil dinas yang diserahkan kepada Satgas Penanganan Covid-19, kembali memunculkan opini. Salah satu anggota dewan, Hidayat menilai bahwa kepala daerah tidak menunjukkan sikap yang konsisten, sehingga mempengaruhi penilaian publik kepada kepala daerah sebagai pemimpin⁷. Peneliti melihat dari fenomena yang terjadi bahwa Humas tidak memiliki sifat responsif terhadap isu yang berkembang. Fungsi dan tugas Humas dalam pemerintahan kurang berjalan efektif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatera Barat dalam menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat mengenai kebijakan pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana penerapan manajemen isu yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumatera Barat dalam menanggapi isu terkait kasus pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di masa pandemi?

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2022/03/31/170700578/balada-mobil-dinas-baru-gubernur-dan-wagub-sumbar-sempat-diserahkan-untuk?page=all>

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen isu terkait kebijakan pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di masa pandemi
2. Untuk menganalisis koordinasi antara Biro Administrasi Pimpinan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam manajemen isu pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
3. Untuk mendeskripsikan kendala dalam proses manajemen isu pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di masa pandemi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya Hubungan Masyarakat, serta juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai studi penelitian relevan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen isu oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Biro Administrasi Pimpinan khususnya bagian Materi Komunikasi Pimpinan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menghadapi serta mengelola isu terkait kebijakan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.